

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
TAHUN 2022**



**DINAS TENAGA KERJA**

**JL. Veteran No. 53 Telp. (0334) 881546**

**Lumajang**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (P-Renja) ini mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Periode Tahun 2018 – 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2022. Sehingga Program dan Kegiatan Perubahan yang akan direncanakan untuk tahun 2022 adalah berdasarkan pada program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam P-Renstra dan P-RKPD tersebut.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen P-Renja 2022 Dinas Tenaga Kerja masih belum dapat memenuhi harapan, saran dan perbaikan selalu kami harapkan demi penyempurnaan substansi dari dokumen ini. Demikian penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini untuk dipergunakan sebagai pedoman kerja.

Lumajang, Agustus 2022

Mengetahui,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
  
dr. BO SYIDAH  
NIP. 19711018 200604 2 009

## DAFTAR ISI

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	56
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	58
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah.....	58
3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	59
BAB IV PENUTUP.....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lumajang .....	16
Tabel 2.2 T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang .....	30
Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	33
Tabel 2.4 T-C.31. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 Kabupaten Lumajang .....	35
Tabel 2.5 T-C.32. Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Lumajang Tahun 2022 .....	57
Tabel 3.1 Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	58
Tabel 3.2 Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	58
Tabel 3.3 T-C. 33 Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Lumajang .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 21 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kinerja adalah dokumen perubahan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja. Tahap penetapan rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh

Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja menetapkan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Perubahan Renja PD sebagai dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra PD yang merupakan perubahan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang merupakan proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 berdasarkan pada regulasi sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2018-2023;
23. Intruksi Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja adalah untuk memberikan gambaran perencanaan dan penganggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja adalah :

- a. Optimalisasi pencapaian sasaran Perubahan Rencana Strategis perangkat daerah
- b. Menyediakan dokumen perubahan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perubahan perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2022;
- d. Sebagai dokumen perubahan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RPKD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

##### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN**  
**BERKENAAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 9 (sembilan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp 2.260.378.528,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) . dalam pelaksanaan program tersebut dapat diselesaikan hampir seluruhnya dengan optimal. Secara detail pelaksanaan untuk program-program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program Pembinaan Lingkungan Sosial dilaksanakan di bidang ketenagakerjaan dengan sumber dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,00 yang meliputi 3 (tiga) kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja. Adapun

program ini pada pelaksanaannya diampu oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Adapun dengan realisasi sebesar Rp 1.195.617.750,00 atau sebesar 79,71.% dengan sisa anggaran sebesar Rp 304.382.250,00. Berikut ini rincian masing-masing kegiatan adalah :

- a. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator kegiatan adalah jumlah penganggur dan setengah penganggur yang ditempatkan. Capaian kegiatan ini sebesar 73,31% dengan serapan anggaran sebesar Rp 733.061.250,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 266.938.750,00. Adapun alasan penyerapan tersebut dikarenakan kegiatan tersebut dianggarkan melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang ditetapkan pada tribulan III. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Bulan November, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan padat karya dilaksanakan tidak sesuai rincian DPA.
- b. Kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dengan pagu anggaran sejumlah Rp 451.250.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dengan indikator kegiatan adalah jumlah pencari kerja yang dilatih. Capaian kegiatan ini sebesar 99,46% dengan serapan anggaran sebesar Rp 448.809.000,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 2.441.000,00.
- c. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan pagu

anggaran sebesar Rp 48.750.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator kegiatan ini adalah jumlah pencari kerja yang mengikuti bursa kerja dan ditempatkan. Capaian kegiatan ini sebesar 28,20% dengan serapan anggaran sebesar Rp13.747.500,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 35.002.500,00, dikarenakan kegiatan tersebut dianggarkan melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang ditetapkan pada tribulan III. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Bulan Oktober, namun karena perkembangan Pandemi Covid 19 yang terus meningkat dan pelaksanaannya memerlukan persetujuan dan pertimbangan Bupati, sehingga akan diselenggarakan pada Minggu akhir bulan November 2020. Kasus Covid 19 semakin meningkat dan pada November minggu III - IV dan Kabupaten Lumajang dengan kategori Zona Merah, sehingga berisiko untuk melakukan kegiatan dengan pengumpulan orang dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan beberapa OPD dan pihak Kepolisian, serta mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 November 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka kegiatan Bursa Kerja Mini tidak dapat diselenggarakan.

- d. Capaian kegiatan ini sebesar 28,20% dengan serapan anggaran sebesar Rp 13.747.500,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 35.002.500,00. Adapun realisasi yang rendah dikarenakan anggaran tersebut merupakan anggaran yang melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga ditetapkan pada tribulan III. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Bulan Oktober, namun karena perkembangan

Pandemi Covid 19 yang terus meningkat, untuk melaksanakannya memerlukan persetujuan dan pertimbangan Bupati, dan ditetapkan diselenggarakan pada Minggu akhir bulan November 2020. Kasus Covid 19 semakin meningkat dan pada November minggu III - IV dan Kabupaten Lumajang masuk pada Zona Merah, sehingga berisiko untuk melakukan kegiatan dengan pengumpulan orang dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan beberapa OPD dan Pihak Kepolisian, serta mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 November 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kegiatan Bursa Kerja Mini tidak dapat diselenggarakan.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Tenaga Kerja sehingga terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan yaitu Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang diampu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Alokasi anggaran sebesar Rp 436.615.028,00 dengan realisasi sebesar Rp 417.640.805,00 atau sebesar 95,65% dan sisa anggaran sebesar Rp 18.974.223,00 .

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Tenaga Kerja. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur yang diampu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.352.000,00 dengan serapan sebesar 99,63% atau sejumlah Rp 42.195.302,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 156.698,00.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pagu dari program ini sebesar Rp 8.372.000,00 dengan serapan sebesar 99,45% atau sebanyak Rp 8.326.000,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 46.000,00. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP yang diampu oleh Sub Bagian Penyusunan Program dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.730.000,00 dengan realisasi 99,02% atau sejumlah Rp 4.684.000,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 46.000,00.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diampu oleh Sub Bagian Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.642.000,00 dengan realisasi 100%.
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang diampu oleh Sub Bagian Penyusunan Program dengan anggaran sebelum perubahan Rp 4.519.000,00 dan mengalami perubahan anggaran dikarenakan *self blocking* menjadi 0.

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja serta kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja yang keduanya diampu oleh Bidang Pelatihan Tenaga Kerja. Pagu dari program ini adalah 73.955.000,00 dengan realisasi sebesar 100%. Adapun

rincian kegiatan yang termasuk program ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan indikator jumlah pencari kerja yang dilatih diampu oleh Seksi Pelatihan Kerja. Adapun pagu anggaran Rp 69.405.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 69.405.000,00
- b. Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja dengan indikator jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina. Apagu anggaran Rp 4.550.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 4.550.000,00

6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pagu dari program ini adalah Rp. 74.100.000,00 dengan serapan sebesar 100%. Program ini diampu bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dimana terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- a. Perluasan Kesempatan Kerja melalui Sistem Padat Karya yang diampu oleh Seksi Perluasan Kesempatan Kerja. Indikator kegiatan ini adalah jumlah penganggur dan setengah penganggur yang ditempatkan. Adapun anggaran sebelum perubahan Rp 122.515.000,00 dan mengalami perubahan anggaran dikarenakan *self blocking* menjadi 0.
- b. Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang diampu oleh Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dengan pagu anggaran Rp 74.100.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 74.100.000,00. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah pencari kerja yang difasilitasi.

7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dimana program ini diampu oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pagu program ini adalah 95.820.000,00 dengan serapan sebesar 100%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :



- a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp 4.505.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 4.505.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator jumlah kasus perselisihan yang difasilitasi.
  - b. Fasilitasi dan Koordinasi Penetapan UMK dengan pagu anggaran Rp 85.425.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 85.425.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan indikator yaitu jumlah rumusan usulan UMK (Upah Minimum Kerja) yang dibuat dan jumlah perusahaan yang dipantau tentang pelaksanaan syarat kerja, UMK, dan jaminan sosial.
  - c. Fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dengan pagu anggaran Rp 5.890.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 5.890.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Kelembagaan Tenaga Kerja dengan indikator jumlah perusahaan dan lembaga ketenagakerjaan yang dibina.
8. Program Pengembangan Ketenagakerjaan
- Program ini diampu oleh Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 18.607.500,00 dengan realisasi sebesar 100%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
- a. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp 7.532.500,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 7.532.500,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator jumlah tenaga kerja yang dilatih
  - b. Validasi Data dan Informasi Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp 6.250.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 6.250.000,00. Kegiatan ini diampu oleh

Seksi Pendataan dan Informasi Ketenagakerjaan dengan indikator jumlah perusahaan yang diinventarisir.

- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran Rp 4.925.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 4.925.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator jumlah perusahaan yang dimonitor.

#### 9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan SDM dengan pagu anggaran Rp 10.457.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 10.457.000,00. Program ini diampu oleh seksi Ketransmigrasian pada Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dengan indikator jumlah calon transmigran yang dilatih dan jumlah calon transmigran yang ditempatkan.

Capaian indikator kinerja keseluruhan di Dinas Tenaga Kerja telah mendekati optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan peningkatan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lumajang dengan tingkat serapan anggaran 85,69% atau sebesar Rp 1.936.819.357,00 dengan sisa anggaran Rp 323.559.171,00.

Secara detail pelaksanaan program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp 602.659.944 realisasi Rp 591.557.744 capaian anggaran 98,16%. Program ini diampu dua bidang yaitu bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan dan sumber dana berasal dari DAU dan DBHCHT. Adapun capaian kinerja adalah Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n adalah sebanyak 240 orang, Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina adalah 17 lembaga, dan jumlah

Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas sebanyak 15 perusahaan.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp 3.040.000,00 dan capaian anggaran 100% dimana anggaran tersebut berada pada sub kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan indikator Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya dan realisasi sebesar 105 orang.
3. Program Hubungan Industrial dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.851.000 realisasi anggaran sebesar 100%. Adapun uraian dari realisasi kinerja adalah Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online sebanyak 33 perusahaan, Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan sebanyak 2 laporan, dan Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan sebanyak 8 perkara.
4. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 3.791.146.040 dan serapan Rp 3.754.630.843 dengan realisasi sebesar 99,04%

Adapun evaluasi capaian hasil indikator kinerja sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1 T-C.29

Tabel 2.1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>									
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja dilatih</b>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase Peningkatan Produktifitas Perusahaan	100%	100%	100%	81.82%	81.82	100%	94%	93.94

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.03.2.01</b>	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	20 orang	10 orang	0	0	0	20 orang	10 orang	50
<b>2.07.03.2.01.01</b>	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari iKerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja di latih berdasarkan Klaster Kompetensi	120 orang	140 orang	140 orang	140 orang	100	240 orang	174 orang	72.5
<b>2.07.03.2.01.01</b>	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina	100%	100%	100%	106.67%	106.67	100%	102.22%	102.22
<b>2.07.03.2.02</b>	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina	100%	100%	100%	106.67%	106.67	100%	102.22%	102.22
<b>2.07.03.2.02.02</b>	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dibina	17 LPKS	15 LPKS	15 LPKS	16 LPKS	106.67	16 LPKS	16 LPKS	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.03.2.04</b>	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Prosentase Perusahaan yang di Monev	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
<b>2.07.03.2.04.01</b>	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang melakukan Konsultasi	70 perusahaan	12 perusahaan	11 perusahaan	11 perusahaan	100	15 perusahaan	13 perusahaan	86.67
		Jumlah Perusahaan yang di Monev	70 perusahaan	12 perusahaan	11 perusahaan	11 perusahaan	100	15 perusahaan	13 perusahaan	86.67
<b>3.23.03</b>	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase transmigran terlatih yang ditempatkan	100%	100%	0%	0	0	0%	33.30%	0.00%
<b>3.23.03.2.01</b>	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah KK Transmigran ditempatkan	5 KK	7 KK	0 KK	0	0	0 KK	3 KK	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>3.23.03.2.01.01</b>	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah KK Transmigran diberangkatkan	5 KK	7 KK	0 KK	0	0	0 KK	3 KK	0
<b>3.23.03.2.01.05</b>	Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang diberikan penyuluhan	25 KK	0 KK	20 KK	20 KK	100	0	7 KK	0
<b>3.23.03.2.01.06</b>	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dilatih	20 KK	0 KK	0 KK	0 KK	0	0 KK	0 KK	0
<b>2.07.04</b>	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan / difasilitasi	47%	125.65%	70%	122.93%	175.61	46%	98.19%	213.45
<b>2.07.04.2.01</b>	Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis pelayanan yang di lakukan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.04.2.01.05</b>	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	400 orang	200 orang	800 orang	1896 orang	237	0 orang	333 orang	0
<b>2.07.04.2.03</b>	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah jenis media informasi pasar kerja yang di kelola	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	1 jenis	33.33
<b>2.07.04.2.03.03</b>	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari ditempatkan melalui penyelenggaraan Bursa pasar kerja	150 orang	646 orang	750 orang	321	42.8	100 orang	356 orang	356
<b>2.07.04.2.04</b>	Kegiatan Pelindungan PMI (PradanPurnaPenempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang di fasilitasi	100 orang	277 orang	300 orang	267 orang	89	56 orang	200 orang	357.14
<b>2.07.04.2.04</b>	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI yang di fasilitasi	100 orang	277 orang	300 orang	267 orang	89	56 orang	200 orang	357.14



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.05</b>	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase perusahaan yang mempunyai PP	24%	21.78%	22%	21.78%	99	23%	22.19%	96.48%
		Prosentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
<b>2.07.05.2.01</b>	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan	15 dok	22 dok	15 dok	13 dok	86.67	15 dok	17 dok	133
		Jumlah perusahaan yang didata	75 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	300 perusahaan	300	60 perusahaan	154 perusahaan	256.67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.05.2.01.01</b>	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	15 dok	22 dok	15 dok	13 dok	86.67	15 dok	17 dok	113.33
<b>2.07.05.2.01.03</b>	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah pendataan perusahaan yang dilaksanakan	75 Perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	300 perusahaan	300	60 Perusahaan	154 Perusahaan	256.67
<b>2.07.05.2</b>	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	15 Kasus	13 Kasus	15 Kasus	14 kasus	93.33	10 kasus	13 kasus	130
<b>2.07.05.2.02.02</b>	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Peselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	15 Kasus	13 Kasus	15 Kasus	14 kasus	93.33	10 kasus	13 kasus	130

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.05.2.02.02</b>	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah perusahaan yang di Monitoring Pengupahannya dan pelaksanaan Jamsosteknya	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	0	0	100 perusahaan	67 perusahaan	67
<b>2.07.01</b>	PROGRAM PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
<b>2.07.01.2.01</b>	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
<b>2.07.01.2.01.02</b>	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0 dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.01.2.01.06</b>	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	5 dokumen	12 dokumen	240
<b>2.07.01.2.01.07</b>	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan IKM	2 kali	0	0	0	0	0 dokumen	0 dokumen	0
<b>2.07.01.2.02</b>	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
<b>2.07.01.2.02.01</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	33 ASN	28 ASN	29 ASN	29 ASN	100	31 ASN	31 ASN	100
<b>2.07.01.2.02.02</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.01.2.02.04</b>	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	12 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0 dokumen	0
<b>2.07.01.2.02.05</b>	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
<b>2.07.01.2.02.07</b>	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0 dokumen	0
<b>2.07.01.2.06</b>	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
<b>2.07.01.2.06.01</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Yang disediakan	4 jenis	9 jenis	10 jenis	10 jenis	100	4 jenis	8 jenis	200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.01.2.06.04</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
<b>2.07.01.2.06.05</b>	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak yang disediakan	5 jenis	11 jenis	6 jenis	6 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
		Jumlah Fasilitas Penggandaan Dokumen	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0 bulan	0
<b>2.07.01.2.06.09</b>	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rakor SKPD	12 kali	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.01.2.08</b>	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
<b>2.07.01.2.08.02</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	5 rekening	5 rekening	5 rekening	5 rekening	100	5 rekening	5 rekening	100
<b>2.07.01.2.08.04</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
<b>2.07.01.2.09</b>	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
<b>2.07.01.2.09.02</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara	20 kendaraan dinas	20 kendaraan dinas	20 kendaraan dinas	20 kendaraan dinas	100	20 kendaraan dinas	20 kendaraan dinas	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>2.07.01.2.09.06</b>	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain yang dipelihara	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100



## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian. Dinas tenaga kerja dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian
- d. Pelaksanaan administrasi dinas tenaga kerja
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Upaya Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja sebagai tujuan jangka menengah dapat dilihat dari beberapa strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan keterampilan
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
3. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan memonitor pelaksanaannya
4. Melaksanakan pendataan dan monitoring penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan

Dalam analisa kinerja Dinas Tenaga Kerja, telah dijabarkan indikator penetapan kinerja yang tersaji pada Tabel 2.2 T-C. 30

Tabel 2.2 T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif		-	100%	100%	100%	100%	81.82%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan		-	70%	46%	47%	48%	122.93%	46%	47%	48%	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		-	63%	67%	68%	69%	62.52%	67%	68%	69%	
5	Persentase penempatan transmigran sesuai standar		-	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Tenaga Kerja berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Faktor Kekuatan (*Strengths*)
  1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas sesuai kewenangan Dinas Tenaga Kerja;
  2. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja;
  3. Budaya kerja aparatur Dinas Tenaga Kerja yang profesional, memiliki integritas, berdedikasi dan berkomitmen tinggi;
  4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
  5. Memiliki rencana program kerja yang sudah tersusun dengan baik.
- b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)
  1. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
  2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas;

3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum yang sesuai peta jabatan;
  4. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya;
  5. Masih lemahnya koordinasi antar unit kerja dalam monitoring evaluasi perencanaan;
  6. Pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal;
  7. Adanya pelaksanaan aktifitas pada sub kegiatan yang tidak tepat waktu;
  8. Adanya beberapa tugas tambahan yang tidak dapat diprediksi.
- c. Faktor Peluang (*Opportunity*)
1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  2. Kesempatan kerja di luar negeri terbuka luas;
  3. Adanya kebutuhan pelatihan ketrampilan teknis dan manajerial pencari kerja untuk mengisi peluang kerja untuk mengisi peluang kerja pada dunia usaha dan masyarakat
  4. Tersedianya Lembaga Pelatihan (Pemerintah/Swasta) yang menyelenggarakan pelatihan kerja;
  5. Terbukanya kerjasama antar dinas/instansi pusat dan daerah serta dengan provinsi lain dibidang ketenagakerjaan.
- d. Faktor Ancaman (*Threats*)
1. Rendahnya upah pekerja/buruh telah mendorong gejala pekerja dan maraknya TKI ilegal;
  2. Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru dan pemulangan TKI bermasalah;
  3. Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk

mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri;

4. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar.

Perumusan isu-isu strategis pada dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis kesetaraan gender	Masih rendahnya penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian dan ketrampilan masih relatif kecil Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja Terbatasnya perkembangan usaha swasta di sektor industry menengah keatas yang diharapkan dapat membuka kesempatan kerja yang tersedia bagi

pengganggu  
Belum optimalnya  
fasilitasi  
penempatan  
transmigrasi

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4 T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4 T-C.31. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 Kabupaten Lumajang

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Lumajang	Prosentase Pencari Kerja dilatih	100%	Rp 622,999,852.00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Lumajang	Prosentase Pencari Kerja dilatih	100%	Rp 535,313,300.00	
		Kab. Lumajang	Persentase Peningkatan Produktifitas Perusahaan	100%			Kab. Lumajang	Persentase Peningkatan Produktifitas Perusahaan	100%		
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lumajang	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	20 orang	Rp 599,999,852.00	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lumajang	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	20 orang	Rp 450,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03. 2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab.Lu majang	Jumlah pencari kerja di latih berdasarkan Klaster Kompetensi	240 orang	Rp 599,999,852.00	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab.Lumajang	Jumlah pencari kerja di latih berdasarkan Klaster Kompetensi	240 orang	Rp 450,000,000.00	
2.07.03. 2.01.01	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina	100%	Rp 8,000,000.00	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina	100%	Rp 25,313,300.00	



KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.02	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dibina	18 LPKS	Rp 8,000,000.00	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dibina	18 LPKS	Rp 25,313,300.00	
2.07.03.2.02.02	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Prosentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi	100%	Rp 15,000,000.00	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Prosentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi	100%	Rp 60,000,000.00	
2.07.03.2.04		Perusahaan	Prosentase Perusahaan yang di Monev	100%			Perusahaan	Prosentase Perusahaan yang di Monev	100%		
2.07.03.2.04.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah Perusahaan kecil yang melakukan Konsultasi	70 perusahaan	Rp 15,000,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas	Disnaker	Jumlah Perusahaan kecil yang melakukan Konsultasi	70 perusahaan	Rp 60,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang di Monev	70 perusahaan		s kepada Perusahaan Kecil	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang di Monev	70 perusahaan		
3.23.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Lumajang	Prosentase transmigran terlatih yang ditempatkan	100%	Rp 21,000,000.00	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Lumajang	Prosentase transmigran terlatih yang ditempatkan	100%	Rp 149,271,200.00	
3.23.03.2.01	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Lumajang	Jumlah KK Transmigran ditempatkan	5 KK	Rp 21,000,000.00	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Lumajang	Jumlah KK Transmigran ditempatkan	5 KK	Rp 149,271,200.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.23.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Lumajang	Jumlah KK Transmigrasi diberangkatkan	5 KK	Rp 21,000,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Lumajang	Jumlah KK Transmigrasi diberangkatkan	5 KK	Rp 94,271,200.00	
3.23.03.2.01.05	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Kab. Lumajang	Jumlah Calon Transmigrasi dilatih	0	Rp -	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Kab. Lumajang	Jumlah Calon Transmigrasi dilatih	20 KK	Rp 20,000,000.00	
3.23.03.2.01.06	Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lumajang	Jumlah Calon Transmigrasi yang diberikan penyuluhan	0	Rp -	Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lumajang	Jumlah Calon Transmigrasi yang diberikan penyuluhan	25 KK	Rp 35,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Lumajang	Prosentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan / difasilitasi	47%	Rp 100,000,000.00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Lumajang	Prosentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan / difasilitasi	47%	Rp 800,000,000.00	
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	jumlah jenis pelayanan yang dilakukan	3 jenis	Rp 50,000,000.00	Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	jumlah jenis pelayanan yang dilakukan	3 jenis	Rp 400,000,000.00	
2.07.04.2.01.05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Desa	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	400 orang	Rp 50,000,000.00	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Desa	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	400 orang	Rp 400,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	Jumlah jenis media informasi pasar kerja yang di kelola	3 jenis	Rp 25,000,000.00	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	Jumlah jenis media informasi pasar kerja yang di kelola	3 jenis	Rp 200,000,000.00	
2.07.04.2.03.03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lumajang	Jumlah pencaker ditempatkan melalui penyelenggaraan Bursa pasar kerja	150 orang	Rp 25,000,000.00	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lumajang	Jumlah pencaker ditempatkan melalui penyelenggaraan Bursa pasar kerja	150 orang	Rp 200,000,000.00	
2.07.04.2.04	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Desa	Jumlah PMI yang di fasilitasi	150 orang	Rp 25,000,000.00	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Desa	Jumlah PMI yang di fasilitasi	150 orang	Rp 200,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04. 2.04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Desa	Jumlah PMI yang di fasilitasi	150 orang	Rp 25,000,000.00	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Desa	Jumlah PMI yang di fasilitasi	150 orang	Rp 200,000,000.00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	prosentase perusahaan yang mempunyai PP	24%	Rp 33,764,000.00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	prosentase perusahaan yang mempunyai PP	24%	Rp 153,764,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Perusahaan	prosentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia	100%			Perusahaan	prosentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia	100%		
2.07.05.2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan dan jumlah perusahaan yang di bina	15 dokumen	Rp 19,900,000.00	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disnaker	jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan dan jumlah perusahaan yang di bina	15 dokumen	Rp 100,000,000.00	
		Perusahaan	jumlah perusahaan yang didata	75 perusahaan			Perusahaan	jumlah perusahaan yang didata	75 perusahaan		

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05. 2.01.01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	15 dokumen	Rp 9,600,000.00	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	15 dokumen	Rp 50,000,000.00	
2.07.05. 2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Perusahaan	jumlah pendataan perusahaan yang dilaksanakan	75 perusahaan	Rp 10,300,000.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Perusahaan	jumlah pendataan perusahaan yang dilaksanakan	75 perusahaan	Rp 50,000,000.00	



KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	15 kasus	Rp 13,864,000.00	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	15 kasus	Rp 53,764,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05. 2.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	15 kasus	Rp 9,764,000.00	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	15 kasus	Rp 13,764,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05. 2.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Lumajang	Jumlah perusahaan yang di Monitoring Pengupahannya	100 perusahaan	Rp 4,100,000.00	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Lumajang	Jumlah perusahaan yang di Monitoring Pengupahannya	100 perusahaan	Rp 40,000,000.00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Disnaker	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Rp 4,148,212,184.00	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Disnaker	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Rp 4,810,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp 10,500,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp 30,000,000.00	
2.07.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 3,500,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 10,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01. 2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dokumen	Rp 3,500,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dokumen	Rp 10,000,000.00	
2.07.01. 2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah fasilitasi penyusunan IKM	2 kali	Rp 3,500,000.00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah fasilitasi penyusunan IKM	2 kali	Rp 10,000,000.00	
2.07.01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 3,570,500,000.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 3,940,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01. 2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Disnaker	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	33 ASN	Rp 3,500,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Disnaker	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	33 ASN	Rp 3,850,000,000.00	
2.07.01. 2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disnaker	Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	Rp 60,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disnaker	Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	Rp 70,000,000.00	
2.07.01. 2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Rp 3,500,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Rp 5,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01. 2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	12 dokumen	Rp 3,500,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	12 dokumen	Rp 10,000,000.00	
2.07.01. 2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 dokumen	Rp 3,500,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 dokumen	Rp 5,000,000.00	
2.07.01. 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 177,212,184.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 260,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01. 2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang disediakan	4 jenis	Rp 4,500,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang disediakan	4 jenis	Rp 10,000,000.00	
2.07.01. 2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 jenis	Rp 80,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 jenis	Rp 90,000,000.00	
2.07.01. 2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Jenis barang cetakan yang disediakan	5 jenis	Rp 4,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan	Disnaker	Jumlah Jenis barang cetakan yang disediakan	5 jenis	Rp 10,000,000.00	



KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disnaker	Jumlah Fasilitas Penggandaan Dokumen	12 bulan		Penggandaan	Disnaker	Jumlah Fasilitas Penggandaan Dokumen	12 bulan		
2.07.01. 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Fasilitas Rakor SKPD	12 kali	Rp 88,712,184.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Fasilitas Rakor SKPD	12 kali	Rp 150,000,000.00	
		Kab. Lumajang dan Luar Daerah	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	2 kegiatan			Kab. Lumajang dan Luar Daerah	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	2 kegiatan		
2.07.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	Rp 310,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	Rp 400,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01. 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Rekening yang dibayar	5 rekening	Rp 60,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Rekening yang dibayar	5 rekening	Rp 100,000,000.00	
2.07.01. 2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Rp 250,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Rp 300,000,000.00	
2.07.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100%	Rp 80,000,000.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100%	Rp 180,000,000.00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01. 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara	20 kendaraan dinas	Rp 70,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara	20 kendaraan dinas	Rp 125,000,000.00	
2.07.01. 2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain yang dipelihara	3 jenis	Rp 10,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain yang dipelihara	3 jenis	Rp 55,000,000.00	
	JUMLAH				Rp 4,925,976,036.00					Rp 6,448,348,500.00	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan kegiatan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja untuk tahun anggaran 2022 adalah nihil, dengan demikian penyelenggaraan pemerintah memperhatikan permasalahan serta isu - isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Adapun tabel usulan program dan kegiatan masyarakat tersaji dalam Tabel 2.5 T-C. 32

Tabel 2.5 T-C.32. Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja berdasar pada Perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2022

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2022</b>
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%

Dan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka disusunlah beberapa sasaran yaitu :

Tabel 3.2 Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>
Meningkatnya kualitas pencari kerja	Prosentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%
Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	47%

sektor

ketenagakerjaan

Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	68%
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase penempatan transmigran sesuai standar	100%

### **3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Dengan memperhatikan isu – isu strategis Dinas Tenaga Kerja sebagaimana berikut :

1. Jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan masih relatif kecil.
2. Rendahnya motivasi pencari kerja untuk berwira usaha karena keterbatasan ketrampilan dan modal usaha.
3. Terbatasnya perkembangan usaha swasta di sektor industri menengah ke atas yang diharapkan dapat menampung membuka kesempatan kerja yang tersedia bagi penganggur.
4. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
5. Belum optimalnya fasilitasi penempatan transmigran.
7. Adanya refocusing anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

Maka Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai target indikator sasaran memfokuskan pada :

1. Pelaksanaan pelatihan kerja bagi pencari kerja terdaftar berdasarkan klaster kompetensi sebagai upaya peningkatan daya saing tenaga kerja
2. Pelaksanaan metode peningkatan dan pengukuran produktifitas
3. Pelaksanaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja
4. Pelaksanaan pembinaan kepada perusahaan terkait kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
5. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan bagi catrans serta pemberangkatannya

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2022, serta mempertimbangkan misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018 - 2023 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri maka disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi serta memperhatikan program prioritas nasional, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam Tabel 3.3 T-C. 33 Perubahan sebagai berikut :



Tabel 3.3 T-C. 33 Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Lumajang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,598,348,500					4,924,111,530		-1,674,236,970			5,193,618,755
2	7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6,449,077,300					4,884,111,530					5,051,533,955
2	7 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan				100%	4,810,000,000				100%	4,236,211,968				100%	4,211,149,093

					<b>N DAERAH KABUPATEN/K OTA</b>	<b>operasional perkantora n</b>															
2	0701	2	01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja</b>				<b>100 %</b>	<b>30,000, 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		Efektifita s Anggara n	<b>100 %</b>	<b>30,000, 000</b>	
2	0701	2	02	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD			1 dok ume n	10,000, 000			0 dok ume n	0					1 dok ume n	10,000,0 00	
							Penyusun an Dokumen RKA SKPD	1	Dinas Tenag a Kerja	1 dok ume n	10,000, 000	Penyus unan Dokum en RKA SKPD	1	Dinas Tenag a Kerja	0 dok ume n	0	-	- 10,000,0 00	Efektifita s Anggara n	1 dok ume n	10,000,0 00
2	0701	2	06	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan			5 lapo ran	10,000, 000			0 lapo ran	0					5 lapo ran	10,000,0 00	

					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Penyusunan Dokumen LAKIP	1	Dinas Tenaga Kerja	5 laporan	10,000,000	Penyusunan Dokumen LAKIP	1	Dinas Tenaga Kerja	0 laporan	0	-	-	10,000,000	Efektifitas Anggaran	5 laporan	10,000,000
2	07	01	2017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 laporan	10,000,000			0 laporan	0					2 laporan	10,000,000	
						Penyusunan Dokumen IKM	1	Dinas Tenaga Kerja	2 laporan	10,000,000	Penyusunan Dokumen IKM	1	Dinas Tenaga Kerja	0 laporan	0	-	-	10,000,000	Efektifitas Anggaran	2 laporan	10,000,000
2	07	01	2022	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>100 %</b>	<b>3,940,000,000</b>			<b>100 %</b>	<b>3,552,947,384</b>					<b>100 %</b>	<b>3,572,947,384</b>	

2	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 orang	3,850,000,000			33 orang	3,501,931,384				33 orang	3,501,931,384		
							Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Dinas Tenaga Kerja	33 orang	3,850,000,000	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Dinas Tenaga Kerja	33 orang	3,501,931,384	DAU	-348,068,616	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	33 orang	3,501,931,384
2	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	70,000,000			12 dokumen	51,016,000				12 dokumen	51,016,000		
							Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	1	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	70,000,000	Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	1	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	51,016,000	DAU	-18,984,000	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	12 bulan	51,016,000
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan			12 dokumen	10,000,000			0 dokumen	0				12 dokumen	10,000,000		

						nAkuntansi SKPD														
							Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	1	Dinas Tenaga Kerja	12 dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	1	Dinas Tenaga Kerja	0 dokumen	0	-10,000,000	Efektifitas Anggaran	12 dokumen	10,000,000
2	07	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	5,000,000				0				1 laporan	5,000,000
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dinas Tenaga Kerja	1 laporan	5,000,000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dinas Tenaga Kerja	0 laporan	0	-5,000,000	Efektifitas Anggaran	1 laporan	5,000,000

2	07	01	2072	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/S emesteran SKPD			18 laporan	5,000,000			0 laporan	0					18 laporan	5,000,000
						Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1	Dinas Tenaga Kerja	18 laporan	5,000,000	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1	Dinas Tenaga Kerja	0 laporan	0	-5,000,000	Efektifitas Anggaran	18 laporan	5,000,000
2	07	01	206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			100 %	260,000,000			100 %	204,744,250					100 %	204,744,250
2	07	01	206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			1 paket	10,000,000			1 paket	9,907,590					1 paket	9,907,590

						Bangunan Kantor yang Disediakan																						
							Penyediaan	1	Dinas	4	10,000,000	Penyediaan	1	Dinas	4	9,907,590	DAU	-92,410	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	4	9,907,590							
							Instalasi Listrik		Tenaga Kerja	jenis				Tenaga Kerja	jenis					jenis								
2	0	0	2	0	Penyediaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2	90,000,000			2	79,749,230				2	79,749,230								
							Logistik Kantor			paket				paket						paket								
							ATK	1	Dinas	40	75,000,000	ATK	1	Dinas	40	68,583,570	DAU	-6,416,430	Efektifitas Anggaran	40	68,583,570							
									Tenaga Kerja	jenis				Tenaga Kerja	jenis					jenis								
							Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2	Dinas	20	15,000,000	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2	Dinas	20	11,165,660	DAU	-3,834,340	Efektifitas Anggaran	20	11,165,660							
									Tenaga Kerja	jenis				Tenaga Kerja	jenis					jenis								
5	0	0	2	0	Penyediaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan				2	10,000,000			3	26,300,430				3	26,300,430								
										paket				paket						paket								

						Penggandaan yang Disediakan															
							Penyediaan Barang Cetak	1	Dinas Tenaga Kerja	4 jenis	5,000,000	Penyediaan Barang Cetak	1	Dinas Tenaga Kerja	4 jenis	4,827,680	DAU	-172,320	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	4 jenis	4,827,680
							Foto Copy atau Penggandaan	2	Dinas Tenaga Kerja	20.00 lembar	5,000,000	Foto Copy atau Penggandaan	2	Dinas Tenaga Kerja	78.587 lembar	19,646,750	DAU	14,646,750	Menyesuaikan dengan penghitungan kebutuhan operasional	78.587 lembar	19,646,750
												Cetak Banner	3	Dinas Tenaga Kerja	66 lembar	1,826,000		1,826,000	Menyesuaikan kebutuhan operasional perpindahan kantor terbaru	66 lembar	1,826,000
2	0	0	2	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			12 laporan	150,000,000				12 laporan	88,787,000				12 laporan	88,787,000



					SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Penyediaan konsumsi rakor	1	Dinas Tenaga Kerja	9 kali	8,100,000	Penyediaan konsumsi rakor	1	Dinas Tenaga Kerja	4 kali	3,600,000	DAU	-4,500,000	Efektifitas Anggaran	4 kali	3,600,000	
							Penyediaan Perjadin Dalam dan Luar daerah	2	Dinas Tenaga Kerja	2 kegiatan	141,900,000	Penyediaan Perjadin Dalam dan Luar daerah	2	Dinas Tenaga Kerja	2 kegiatan	85,187,000	DAU	-56,713,000	Efektifitas Anggaran	2 kegiatan	85,187,000	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>208</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>				<b>100%</b>	<b>400,000,000</b>				<b>100%</b>	<b>358,854,059</b>					<b>100%</b>	<b>311,854,059</b>
2	07	01	208		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	100,000,000				12 laporan	103,700,459					12 laporan	56,700,459

							Biaya Telepon dan Internet	1	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	18,000,000	Biaya Telepon dan Internet	1	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	30,000,000	DAU	12,000,000	Menyesuaikan dengan penghitungan kebutuhan operasional	12 bulan	18,000,000
							Biaya Air	2	Dinas Tenaga Kerja	1.800 m2	7,200,000	Biaya Air	2	Dinas Tenaga Kerja	1.050 m2	4,200,000	DAU	-3,000,000	Menyesuaikan dengan penghitungan kebutuhan operasional	1.050 m2	4,200,000
							Biaya Listrik	3	Dinas Tenaga Kerja	353 kwh	60,000,000	Biaya Listrik	3	Dinas Tenaga Kerja	203 kwh	34,500,459	DAU	-25,499,541	Menyesuaikan dengan penghitungan kebutuhan operasional	203 kwh	34,500,459
							Penambahan daya listrik	4	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	14,800,000	Penambahan daya listrik	4	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	28,000,000	DAU	13,200,000	Menyesuaikan kebutuhan operasional perpindahan kantor	0	0



											Pembayaran Premi PTT	2	Dinas Tenaga Kerja	12 orang	17,553,600	DAU	17,553,600	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	12 orang	17,553,600	
2	07	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>100%</b>	<b>180,000,000</b>				<b>100%</b>	<b>91,603,400</b>
2	07	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									20 unit	125,000,000				20 unit	64,253,400
							BBM	1	Dinas Tenaga Kerja	4.388 lt	39,500,000	BBM	1	Dinas Tenaga Kerja	2925 lt	26,325,000	DAU	- 13,175,000	Efektifitas Anggaran	2925 lt	30,150,000

							jasa servis mobil dinas	2	Dinas Tenaga Kerja	4 kali	28,000,000	jasa servis mobil dinas	2	Dinas Tenaga Kerja	2 kali	6,000,000	DAU	- 22,000,000	Menyesuaikan dengan penghitungan kebutuhan operasional	2 kali	6,000,000
							penggantian suku cadang ban mobil	3	Dinas Tenaga Kerja	8 buah	12,000,000	penggantian suku cadang ban mobil	3	Dinas Tenaga Kerja	6 buah	4,963,800	DAU	- 7,036,200	Menyesuaikan dengan penghitungan kebutuhan operasional	6 buah	4,963,800
							aki terios	4	Dinas Tenaga Kerja	1 buah	1,200,000	aki terios	4	Dinas Tenaga Kerja	0	0		- 1,200,000	Efektifitas Anggaran	0	0
							aki inova	5	Dinas Tenaga Kerja	1 buah	1,500,000	aki inova	5	Dinas Tenaga Kerja	1 buah	2,757,800	DAU	1,257,800	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	1 buah	2,757,800
							minyak pelumas	6	Dinas Tenaga Kerja	12 kali	16,800,000	minyak pelumas	6	Dinas Tenaga Kerja	0	0		- 16,800,000	Efektifitas Anggaran	0	0

						STNK TERIOS	7	Dinas Tenaga Kerja	1 unit	5,000,000	STNK TERIOS	7	Dinas Tenaga Kerja	0	0	-	5,000,000	Efektifitas Anggaran	0	0	
						pajak kendaraan bermotor	8	Dinas Tenaga Kerja	18 unit	13,000,000	pajak kendaraan bermotor	8	Dinas Tenaga Kerja	18 unit	5,042,400	DAU	-	7,957,600	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	18 unit	5,042,400
						pajak mobil dinas	9	Dinas Tenaga Kerja	2 unit	8,000,000	pajak mobil dinas	9	Dinas Tenaga Kerja	2 unit	3,447,400	DAU	-	4,552,600	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	2 unit	3,447,400
											suku cadang kendaraan roda 4	10	Dinas Tenaga Kerja	24 buah	11,892,000	DAU	11,892,000	Menyesuaikan dengan kebutuhan operasional	24 buah	11,892,000	
2	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28 unit	55,000,000				28 unit	18,950,000				28 unit	18,950,000	

								Biaya pemeliharaan printer	1	Dinas Tenaga Kerja	13 unit	26,000,000	Biaya pemeliharaan printer	1	Dinas Tenaga Kerja	13 unit	5,600,000	DAU	- 20,400,000	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	13 unit	5,600,000
								Biaya komputer	2	Dinas Tenaga Kerja	8 unit	16,000,000	Biaya komputer	2	Dinas Tenaga Kerja	8 unit	4,900,000	DAU	- 11,100,000	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	8 unit	4,900,000
								Biaya Laptop	3	Dinas Tenaga Kerja	7 unit	13,000,000	Biaya Laptop	3	Dinas Tenaga Kerja	7 unit	8,450,000	DAU	- 4,550,000	Menyesuaikan dengan standar biaya pada SIPD	7 unit	8,450,000
2	0	0	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi					1 unit					1 unit	31,887,875				1 unit	0
													pemeliharaan gedung kantor	1	Dinas Tenaga Kerja	1 unit	31,887,875	DAU	31,887,875	Menyesuaikan kebutuhan operasi	1 unit	0

																				nal perpinda han kantor terbaru							
2	0	0	2	1		Pemeliharaan/R ehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si								14 unit					14 unit	8,400,00 0					14 unit	8,400,00 0
												Servis AC	1	Dinas Tenaga Kerja	14 unit	8,400,00 0	DAU	8,400,00 0	Menyesu aikan kebutuh an operasio nal perpinda han kantor terbaru	14 unit	8,400,00 0						
2	7	3				<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA</b>	<b>Prosentase pencari kerja dilatih</b>								<b>100 %</b>	<b>685,31 3,300</b>					<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	<b>556,620 ,862</b>	
							<b>Prosentase peningkata n</b>								<b>100 %</b>						<b>100 %</b>				<b>100 %</b>		



						produktifitas perusahaan															
2	0	0	2		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi</b>				20 orang	<b>600,000,000</b>				20 orang	<b>483,438,812</b>			20 orang	<b>483,438,812</b>	
2	0	0	2	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun				240 orang				240 orang	483,438,812				240 orang	483,438,812	
							Pelatihan Rotan Sintestis	1	Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro	40 orang	109,853,600	Pelatihan Rotan Sintestis	1	Korban Erupsi Kec. Candipuro	20 orang	50,344,600	DBHC HT	- 59,509,000	Efektifitas anggaran, pagu pelaksanaan untuk satu paket kegiatan	20 orang	50,344,600


Pelatihan Mebelair Almunium	2	Desa Grobo gan Keca matan Kedu ngjaja ng	40 oran g	93,003, 200	Pelatih an Mebelai r Almuni um	2	Desa Grobo gan Keca mata n Kedu ngjaja ng	0	0		- 93,003,2 00	Dialihka n untuk jenis paket pelatiha n lainnya berdasar kan proposal masuk	0	0
Pelatihan Pengolaha n Makanan	3	Desa Ledok tempu ro Keca matan Rand uagun g	40 oran g	110,41 0,800	Pelatih an Pengola han Makan an 1	3	Desa Sumb ersuko, Kec Sumb ersuko ( kamp unga nggur )	20 oran g	47,784,1 28	DBHC HT	- 62,626,6 72	Efektifita s anggaran , pagu pelaksana an untuk satu paket kegiatan	20 oran g	47,784,1 28
Pelatihan Batik Tulis	4	Desa Kudu s Keca matan Klaka h	40 oran g	96,402, 700	Pelatih an Batik Tulis	4	Desa Kudu s Keca mata n Klaka h	0	0		- 96,402,7 00	Dialihka n untuk jenis paket pelatiha n lainnya berdasar kan proposal masuk	0	0


		Pelatihan servis sepeda motor	5	Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe	40 orang	102,998,500	Pelatihan Otomotif 1	5	Desa Sumbersuko, Kec Sumbersuko (kampunganggur)	20 orang	46,818,800	DBHC HT	-56,179,700	Efektifitas anggaran, pagu pelaksanaan untuk satu paket kegiatan	20 orang	46,818,800
		Pelatihan Paving stone dan bataco	6	Desa Tegalbangsri Kecamatan Ranuyoso	40 orang	87,331,200	Pelatihan Paving Stone dan Bataco	6	Korban Erupsi Kec. Candipuro	20 orang	48,641,050	DBHC HT	-38,690,150	Efektifitas anggaran, pagu pelaksanaan untuk satu paket kegiatan	20 orang	48,641,050
							Pelatihan Sablon	7	Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo	20 orang	52,352,450	DBHC HT	52,352,450	Pengajuan Proposal masuk dari masyarakat	20 orang	52,352,450
							Pelatihan Otomotif 2	8	Kabupaten Lumajang	20 orang	45,057,800	DBHC HT	45,057,800	Pengajuan Proposal masuk dari masyarakat	20 orang	45,057,800



			<b>2</b>			<b>dibina</b>															
2	0	0	2	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			18 lemb aga	25,313, 300			17 lemb aga	7,696,75 0				17 lemb aga	20,182,0 50		
							Sosialisasi pengelola LPK	1	Kab. Lumaj ang	1 kali	12,485, 300	Sosialis asi pengelo la LPK	1	Kab. Luma jang	0 kali		- 12,485,3 00	Efektifita s anggaran	1 kali	12,485,3 00	
							Monev pengelola LPK	2	Kab. Lumaj ang	18 lemb aga	12,828, 000	Monev pengelo la LPK	2	Kab. Luma jang	17 lemb aga	7,696,75 0	DAU	- 5,131,25 0	Efektifita s anggaran	17 lemb aga	7,696,75 0
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Prosentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi</b>			<b>100</b> <b>%</b>	<b>60,000</b> <b>,000</b>			<b>100</b> <b>%</b>	<b>23,000,</b> <b>000</b>				<b>100</b> <b>%</b>	<b>53,000,</b> <b>000</b>		
2	0	0	2	0	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultans i Peningkata n Produktivitas</b>			70 peru saha an	60,000, 000			70 peru saha an	23,000,0 00				70 peru saha an	53,000,0 00		

								Pembinaan kepada perusahaan kecil	1	Kab. Lumajang	70 perusahaan	30,000,000	Pembinaan kepada perusahaan kecil	1	Kab. Lumajang	70 perusahaan	23,000,000	DAU	- 7,000,000	Efektifitas anggaran dan penyesuaian standar biaya pada SIPD	70 perusahaan	23,000,000
								Monitoring dan evaluasi kepada perusahaan kecil	2	Kab. Lumajang	70 perusahaan	30,000,000	Monitoring dan evaluasi kepada perusahaan kecil	2	Kab. Lumajang	0	0	DAU	- 30,000,000	Efektifitas anggaran	70 perusahaan	30,000,000
2	7	4			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Prosentase pencari kerja yang ditempatkan</b>					<b>47%</b>	<b>800,000,000</b>					<b>47%</b>	<b>100,000,000</b>			<b>48%</b>	<b>150,000,000</b>
2	0	0	2		<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kotora</i>	<b>jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL</b>					<b>100 orang</b>	<b>400,000,000</b>					<b>100 orang</b>	<b>50,000,000</b>			<b>100 orang</b>	<b>50,000,000</b>
2	0	0	2	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayak					100 orang	400,000,000					120 orang	50,000,000			120 orang	50,000,000

			1			an Melalui program Perluasan Kesempata n Kerja															
							Kegiatan Padat Karya pemeliharan sarpras lingkungan	1	Desa di Kabupaten Lumajang	1 paket	400,00 0,000	Kegiatan Padat Karya pemeliharaan sarpras lingkungan	1	Desa di Kabupaten Lumajang	1 paket	50,000,0 00	DAU	- 350,000, 000	Efektifitas anggaran	1 paket	50,000,0 00
2	0 7	0 4	2 · 0 3		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah data pasar kerja yang dikelola</b>			<b>6 dokume n 805 org</b>	<b>200,00 0,000</b>			<b>6 dokume n 150 org</b>	<b>25,000, 000</b>					<b>6 dokume n 150 org</b>	<b>25,000, 000</b>	
2	0 7	0 4	2 · 0 3	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatk an Pekerjaan Melalui <i>Job Fair / Bursa Kerja</i>			500 oran g	200,00 0,000			150 oran g	25,000,0 00					150 oran g	25,000,0 00	
						Penyeleng garaan Bursa kerja skala Kabupate n	1	Kabu paten Lumaj ang	1 pake t	200,00 0,000	Penyele nggara an Bursa kerja skala Kabupa ten	1	Kabu paten Luma jang	1 pake t	25,000,0 00	DAU	- 175,000, 000	Efektifitas anggaran	1 pake t	25,000,0 00	

2	0	0	2		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kot a</b>	<b>Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi</b>				<b>160 orang</b>	<b>200,000,000</b>						<b>50 orang</b>	<b>25,000,000</b>			<b>50 orang</b>	<b>75,000,000</b>	
2	0	0	2	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				120 orang	200,000,000						50 orang	25,000,000			50 orang	75,000,000	
							Fasilitasi Pelatihan CPMI	1	Kabupaten Lumajang	1 paket	150,000,000	Fasilitasi Pelatihan CPMI	1	Kabupaten Lumajang	0		-150,000,000	Efektifitas anggaran	0			50,000,000	
							Fasilitasi Pemulangan PMI	2	Kabupaten Lumajang	100 orang	50,000,000	Fasilitasi Pemulangan PMI	2	Kabupaten Lumajang	50 orang	25,000,000	DAU	-25,000,000	Efektifitas anggaran	50 orang			25,000,000
																0							
2	7	0	5		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Prosentase perusahaan yang mempunyai i PP</b>				<b>24%</b>	<b>153,764,000</b>						<b>24%</b>	<b>33,764,000</b>			<b>25%</b>	<b>133,764,000</b>	









							Kasus PHI	Kerja			Kasus PHI	Kerja					biaya pada SIPD			
											Rapat pertemuan pra event Mayday	3	Kab. Lumajang	1 kali	1,142,000	DAU	1,142,000	Menyesuaikan kebutuhan teknis bidang yang belum terakomodir pada renja murni	1 kali	1,142,000
											Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Provinsi	4	Surabaya	4 kali	3,280,000	DAU	3,280,000	Menyesuaikan kebutuhan teknis bidang yang belum terakomodir pada renja murni	4 kali	3,280,000
2	0	0	2	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga			60.000 orang	40,000,000				60.000 orang					60.000 orang	24,000,000

					Pekerja	Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja															
							Monev UMK dan BPJS TK	1	Perusahaan	70 perusahaan	40,000,000	Monev UMK dan BPJS TK	1	Perusahaan	50 perusahaan	12,000,000	DAU	-28,000,000	Efektifitas anggaran, dan agar sisa anggaran bisa mengakomodir usulan aktifitas yang baru	50 perusahaan	12,000,000
							Rapat pertemuan Dewan Pengupahan	2	Kab. Lumajang	1 kali	6,670,000	Rapat pertemuan Dewan Pengupahan	2	Kab. Lumajang	1 kali	6,670,000	DAU	6,670,000	Menyesuaikan kebutuhan teknis bidang yang belum terakomodir pada renja murni	1 kali	6,670,000

												Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Provinsi	3	Surabaya	6 kali	5,330,000	DAU	5,330,000	Menyesuaikan kebutuhan teknis bidang yang belum terakomodir pada renja murni	6 kali	5,330,000				
3																									
3	3	2														149,271,200					40,000,000				
3	3	2	3													149,271,200					40,000,000	100%	100%	100%	142,084,800
3	3	2	3	2011												149,271,200					40,000,000	5 KK	2 KK	2 KK	142,084,800







												Penda mpinga n dan Pember angkat an Transm igran ke Lokasi Tujuan	6	Kabu paten Mamu ju Provi nsi Sulaw esi Barat	2 KK		17,308,0 00	DAU	17,308,0 00	Tahapan yang harus dilalui dalam proses transmig rasi	2 KK	17,308,0 00
3	3 2	0 3	2 .0	0 6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigra n dan/atau Transmigra n yang Mendapatk an Pelatihan			20 KK	20,000, 000							0					20,000,0 00
						Pelatihan Pengolaha n Makanan bagi Catrans	1	Kabu paten Lumaj ang		20,000, 000	Pelatih an Pengola han Makan an bagi Catrans	1	Kabu paten Luma jang				0	- 20,000,0 00		Efektifita s Anggara n		20,000,0 00
3	3 2	0 3	2 .0	1 0	Sub Kegiatan Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigra n Penduduk Asal yang Mendapatk an			25 KK	35,000, 000							0					35,000,0 00

						Penyuluhan												
						Penyuluhan kepada masyarakat calon transmigran	1	Kecamatan Candi puro	35,000,000	Penyuluhan kepada masyarakat calon transmigran	1	Kecamatan Candi puro	0	-35,000,000	Efektifitas Anggaran			35,000,000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD serta Perubahan Renstra 2018-2023.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2022 ini sudah mempertimbangkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023, Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2018 – 2023, serta isu – isu strategis sektor ketenagakerjaan.

Dengan dibuatnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 lebih terarah, karena sudah disusun arah yang menjadi acuan, dengan demikian diharapkan lebih tepat guna dan tepat sasaran baik dalam hal pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dalam hal pembiayaan maupun pencapaian target kinerja serta serapan anggaran

Lumajang, Agustus 2022

Mengetahui,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
  
dr. ROSYIDAH  
NIP. 19711018 200604 2 009